



## Pembangunan Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dalam Perspektif *Development as Freedom* Amartya Sen

Felix Riondi Sugar<sup>1\*</sup>, Arnoldus Roy Alfander<sup>2</sup>, Fridolin De'e<sup>3</sup>, Epi Pianus Gregorius Gadja Wora<sup>4</sup>, Simplisius Seke Kawa<sup>5</sup>, Kristoforus Mage<sup>6</sup>, Champideli Armanoba Jalni<sup>7</sup>, Adrianus Ovin<sup>8</sup>, Flavianus Joerdy Pati Klore<sup>9</sup>, Antonius Sunarno Sam<sup>10</sup>

<sup>1-10</sup> Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [feliksugar@gmail.com](mailto:feliksugar@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the development of super-priority tourism in Labuan Bajo using Amartya Sen's "development as freedom" perspective. This study is motivated by the paradox of tourism development, which, on the one hand, drives economic growth but, on the other hand, gives rise to various social and cultural issues as well as inequalities for local communities. The research method employed is a qualitative approach using a descriptive-analytical design through a literature review. Data were obtained from books, scientific journals, government documents, and various other relevant sources related to tourism development and Amartya Sen's development theory. The results of the study indicate that tourism development in Labuan Bajo has not yet fully expanded the substantive freedoms of local communities. Investor dominance, inequalities in land ownership, low-quality human resources, and minimal community participation constitute forms of "unfreedoms" that the community continues to experience. Therefore, tourism development needs to be directed toward a development model that is inclusive, participatory, and socially just so that the well-being of local communities can be realized more equitably.*

**Keywords:** *Amartya Sen; Development; Freedoms; Labuan Bajo; Super-Priority Tourism.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo menggunakan perspektif *development as freedom* dari Amartya Sen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks pembangunan pariwisata yang di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain memunculkan berbagai persoalan sosial, budaya, dan ketimpangan bagi masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, serta berbagai sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata dan teori pembangunan Amartya Sen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo belum sepenuhnya memperluas kebebasan substantif masyarakat lokal. Dominasi investor, ketimpangan penguasaan lahan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi bentuk ketidakbebasan (*unfreedoms*) yang masih dialami masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata perlu diarahkan pada model pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial agar kesejahteraan masyarakat lokal dapat terwujud secara lebih merata.

**Kata Kunci:** Amartya Sen; Kebebasan; Labuan Bajo; Pariwisata Super Prioritas; Pembangunan.

### 1. PENDAHULUAN

Persisnya pada tanggal 15 Juli 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri untuk membahas berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan lima kawasan wisata unggulan sebagai destinasi prioritas, salah satunya adalah Labuan Bajo. Pengembangan destinasi wisata unggulan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam industri pariwisata global. Selain bertujuan meningkatkan citra pariwisata nasional, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menambah devisa negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat di daerah tujuan wisata. Pemerintah memandang bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Sejalan dengan itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa itu Sandiaga Uno, menyatakan bahwa pengembangan destinasi wisata super prioritas diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan terkait (Kamenparekraf, 2024). Pendapat lain juga datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menilai bahwa pengembangan pariwisata eksklusif adalah tindakan yang tepat, mengingat industri pariwisata menjadi sektor andalan untuk menambah devisa negara dan menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Sakti, 2019). Karena alasan-alasan tersebut, Jokowi semakin percaya diri untuk memilih Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas yang akan dikembangkan. Apalagi nama Labuan Bajo sudah terlebih dahulu dikenal dunia berkat keberadaan binatang purba Komodo dan keindahan bawah lautnya, sehingga pemerintah tidak perlu lagi repot-repot mengiklankan Labuan Bajo.

Pemerintah berdalih bahwa apabila status Labuan Bajo naik menjadi pariwisata premium, maka banyak pihak akan merasakan dampak positifnya. Dengan kata lain, pemerintah mengklaim bahwa lewat pembangunan maka perubahan dan perbaikan – juga kesejahteraan – akan dinikmati oleh semakin banyak orang. Argumen yang digunakan pemerintah perihal “pembangunan menciptakan kesejahteraan” merupakan fenomena yang telah terjadi dalam dua dasawarsa terakhir. Pembangunan menjadi semacam “agama baru” yang dipercayai oleh banyak masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Pembangunan menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan dalam nasib kehidupan mereka (Kristeva, 2015). Konsekuensinya jelas, negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia akan berlomba-lomba mengejar mimpi kesejahteraan dengan meningkatkan pembangunan di mana-mana, seperti yang sedang terjadi di Labuan Bajo. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut, masyarakat tradisional dipaksa untuk mengalami perubahan menjadi masyarakat modern (Aditya Krisnadi, 2023). Namun, dalam kenyataannya pembangunan tidak dapat 100% membawa manfaat secara merata bagi seluruh warga negara. Selain itu, pembangunan juga seringkali direduksi menjadi medan terjadinya hegemoni kekuasaan politik dan pasar yang alih-alih mendatangkan kesejahteraan, tetapi malah menghasilkan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya. Di sinilah letak kontroversi atau ambiguitas dari pembangunan karena pembangunan menjadi sesuatu

yang dikehendaki sekaligus ditentang, dirangkul sekaligus diwaspadai, dan dijalankan sekaligus dilawan (Dale, 2013).

Atas pertimbangan yang lebih kompleks, Amartya Sen sebagaimana yang ditegaskan dalam Gumelar & Qomar (2025) menegaskan bahwa kebebasan memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan. Konsep kebebasan dalam pembangunan menjadi gagasan utama dalam pemikirannya karena menawarkan perubahan mendasar terhadap paradigma pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses memperluas kebebasan manusia dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Menurut Amartya Sen sebagaimana yang diterangkan oleh Saputra et al., (2025) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses memperluas kebebasan substantif individu, yaitu kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai, seperti terbebas dari kelaparan, penyakit, serta memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ia menempatkan kebebasan sebagai tujuan utama pembangunan melalui peran konstitutif, yakni pembangunan dianggap berhasil apabila mampu menghilangkan berbagai bentuk ketidakbebasan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses kesehatan, dan represi politik. Dengan demikian, kebebasan bukan sekadar hasil dari pembangunan, melainkan inti dari kemajuan manusia. Menurut Amartya Sen jika merujuk apa yang ditegaskan dalam Adon et al., (2023) bahwa kebebasan tidak hanya berperan sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kebebasan instrumental meliputi kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan keamanan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu memperoleh pekerjaan, sementara kebebasan politik mendorong pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat (Adon et al., 2023). Selain itu, ia menempatkan manusia sebagai subjek aktif (*agensi*) dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat secara pasif. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan, kesempatan, dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara bermartabat (Kamiliyana & Salsabilla, 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo telah banyak dilakukan dari beragam perspektif. Salah satunya adalah penelitian dari Kiwang & Arif (2020) lebih menyoroti perkembangan sektor pariwisata serta dampak sosial ekonomi yang muncul, seperti peningkatan kunjungan wisatawan,

terbukanya lapangan kerja, perubahan gaya hidup, dan perubahan orientasi pendidikan masyarakat lokal. Sementara itu, ada juga penelitian dari Idris & Destari (2019) dengan lebih menekankan pada persoalan ketimpangan manfaat pembangunan, di mana perkembangan pariwisata lebih banyak menguntungkan kelompok elit dan investor dibanding masyarakat lokal. Di sisi lain ada juga penelitian dari Bahri & Abdilah (2022) yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan tantangan peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata di Labuan Bajo. Pada tujuan yang sama terdapat pula penelitian dari Gumelar & Qomar (2025) yang lebih menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan prinsip kebebasan dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus menganalisis pembangunan pariwisata Labuan Bajo menggunakan perspektif pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*) dari Amartya Sen. Padahal, pendekatan Amartya Sen menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat pembangunan dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perluasan kebebasan substantif masyarakat, seperti kebebasan ekonomi, peluang sosial, partisipasi politik, perlindungan hak hidup, serta kemampuan masyarakat untuk menjadi subjek aktif pembangunan. Selain itu, kajian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada dampak pembangunan secara umum tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan konsep *capability deprivation*, *unfreedoms*, dan *agency* yang menjadi inti pemikiran Amartya Sen. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian terkait bagaimana pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo memengaruhi kebebasan substantif masyarakat lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pembangunan pariwisata Labuan Bajo melalui perspektif Amartya Sen guna melihat sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar memperluas kebebasan dan kapabilitas masyarakat lokal.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo terus mengalami percepatan dan menjadi salah satu proyek strategis nasional pemerintah Indonesia. Di satu sisi, pembangunan tersebut dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta pendapatan daerah. Namun di sisi lain, berbagai persoalan sosial mulai muncul, seperti ketimpangan penguasaan lahan, marginalisasi masyarakat lokal, perubahan budaya, meningkatnya biaya hidup, hingga keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Apabila pembangunan hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan, maka terdapat risiko terabaikannya dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembangunan. Kondisi

ini dapat menyebabkan masyarakat lokal kehilangan ruang hidup, akses ekonomi, bahkan identitas budayanya sendiri di tengah pesatnya pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan kritis yang mampu menilai pembangunan tidak hanya dari keberhasilan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut memperluas kebebasan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, perspektif Amartya Sen menjadi relevan dan penting digunakan karena menawarkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human-centered development*). Penelitian ini menjadi urgen untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pembangunan pariwisata dan kebebasan masyarakat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Oleh karena itu yang menjadi kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*) dari Amartya Sen untuk menganalisis pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial budaya, atau politik pembangunan secara parsial, penelitian ini menempatkan kebebasan substantif masyarakat sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata. Penelitian ini juga menawarkan analisis yang lebih mendalam melalui konsep *capability approach*, *unfreedoms*, dan *agency* untuk melihat bagaimana pembangunan pariwisata memengaruhi kemampuan masyarakat lokal dalam menentukan kehidupannya sendiri secara bebas dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas dampak pembangunan secara umum, tetapi juga menelaah sejauh mana pembangunan tersebut memperluas atau justru membatasi kebebasan masyarakat lokal dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, penelitian ini menghadirkan perspektif kritis terhadap pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima dampak pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi pembangunan berbasis kapabilitas serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pariwisata yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Semiawan, 2010). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menganalisis fenomena pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo melalui perspektif pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*) dari Amartya Sen. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen pemerintah, laporan penelitian, serta berita yang relevan dengan tema penelitian.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata, pembangunan berbasis kebebasan, *capability approach*, serta kondisi sosial masyarakat Labuan Bajo. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan berbagai temuan sesuai dengan kerangka teori Amartya Sen. Analisis penelitian difokuskan pada bagaimana pembangunan pariwisata di Labuan Bajo memengaruhi kebebasan substantif masyarakat lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk-bentuk ketidakbebasan (*unfreedoms*), *capability deprivation*, serta posisi masyarakat sebagai subjek aktif (*agency*) dalam proses pembangunan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan manusia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Development as Freedom sebagai Fondasi Pembangunan ala Amartya Sen***

Konsep kebebasan dalam pembangunan merupakan inti pemikiran Amartya Sen yang mengubah paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menjadi perluasan kebebasan manusia. Dalam pandangan konvensional, keberhasilan pembangunan umumnya diukur melalui indikator makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), akumulasi modal, dan industrialisasi. Namun, Amartya Sen sebagaimana yang ditegaskan oleh Gumelar & Qomar (2025) menegaskan bahwa indikator tersebut hanya merupakan sarana (*means*), bukan tujuan akhir (*ends*) dari pembangunan, karena tujuan utamanya adalah peningkatan kebebasan dan kesejahteraan manusia. Pada posisi yang bersamaan baginya adalah bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan substantif individu, yaitu kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai, seperti terbebas dari kelaparan,

penyakit yang dapat dicegah, serta memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Gumelar & Qomar, 2025). Dalam hal ini, kebebasan menjadi elemen fundamental pembangunan melalui peran konstitutif, yaitu kebebasan sebagai tujuan utama. Pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu memperluas kebebasan manusia dan menghapus berbagai bentuk “ketidakbebasan” (*unfreedoms*), seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, keterbatasan akses kesehatan, dan represi politik. Dengan demikian, kebebasan bukan sekadar hasil pembangunan, melainkan inti dari kemajuan itu sendiri (Saputra et al., 2025).

Satu hal yang pasti adalah bahwa menurut Amartya Sen sebagaimana yang diterangkan oleh Adon et al., (2023) menjelaskan bahwa kebebasan juga memiliki peran instrumental, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Ia mengemukakan lima bentuk kebebasan instrumental yang saling berkaitan, yaitu kebebasan politik (hak berpartisipasi dalam demokrasi dan mengkritik pemerintah), fasilitas ekonomi (akses terhadap sumber daya, pasar, dan kredit), peluang sosial (akses pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kapabilitas), jaminan transparansi (keterbukaan informasi dan aturan untuk mencegah korupsi), serta perlindungan keamanan (jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan saat krisis). Kelima aspek ini saling memperkuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adon et al., 2023). Di satu sisi bahwa kebebasan-kebebasan tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, akses terhadap peluang sosial seperti pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam memanfaatkan fasilitas ekonomi, terutama dalam memperoleh pekerjaan. Sementara itu, kebebasan politik dalam sistem demokrasi dapat mendorong pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu Amartya Sen sebagaimana yang dikutip oleh Kamiliyana & Salsabilla (2025) menekankan bahwa manusia sebagai subjek aktif (*agensi*) yakni dengan menempatkan kebebasan sebagai pusat pembangunan, perspektif ini mengubah posisi manusia dari sekadar penerima manfaat yang pasif menjadi subjek yang aktif. Dengan itu keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari jumlah komoditas yang diterima masyarakat, melainkan dari sejauh mana individu memiliki ruang dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri secara bebas dan bermartabat. Jika dikaji dari konteks demokrasi, kebebasan tidak hanya diukur dari stabilitas ekonomi, tetapi juga dari kebebasan berpendapat yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas aktif terhadap pemerintah, sehingga dapat mencegah krisis dan menuntut akuntabilitas. Sejalan dengan itu, Amartya Sen (1999) mengkritik paradigma pembangunan konvensional yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi, seperti akumulasi modal dan peningkatan pendapatan per kapita. Menurutnya, pendekatan tersebut

kurang memadai karena mengabaikan dimensi kemanusiaan, keadilan, serta kualitas hidup, yang sering berujung pada ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan. Sebagai alternatif, ia menawarkan konsep deprivasi kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu pandangan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi kondisi ketika individu kehilangan kemampuan dasar untuk berfungsi secara layak dalam masyarakat (Sen, 1999). Dalam hal ini, pendapatan hanya bersifat instrumen, sementara yang lebih penting adalah kemampuan individu untuk menggunakannya secara efektif. Oleh karena itu, pembangunan sejati harus mampu menghapus berbagai bentuk “ketidakbebasan” substantif seperti kelaparan, buta huruf, gizi buruk, dan keterbatasan akses kesehatan, karena kondisi tersebut menjadi penghambat utama bagi manusia untuk mengembangkan potensi dan hidup secara bermartabat (Gumelar & Qomar, 2025).

Pendekatan kapabilitas (*capability approach*) sebagaimana yang ditegaskan oleh Amartya Sen (1999) menekankan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari apa yang dapat dilakukan dan dicapai oleh individu, yaitu *functionings*. Menurutnya adalah bahwa kebebasan bersifat multidimensional yang mencakup kebebasan politik, kesempatan ekonomi, peluang sosial (pendidikan dan kesehatan), jaminan transparansi, serta perlindungan keamanan (Adon et al., 2023). Kelima aspek tersebut saling berkaitan secara integratif. Misalnya, tanpa pendidikan yang memadai, individu akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal, dan tanpa kebebasan politik, masyarakat tidak dapat mengawasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Gumelar & Qomar, 2025). Oleh karena itu, pembangunan perlu dipahami sebagai proses yang bersifat integratif, yaitu upaya untuk memperluas seluruh dimensi kebebasan secara simultan dan saling mendukung. Pendekatan ini juga menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengonversi sumber daya menjadi kesejahteraan. Dua orang dengan tingkat pendapatan yang sama, misalnya, belum tentu memiliki kualitas hidup yang setara karena dipengaruhi oleh faktor kesehatan, pendidikan, lingkungan sosial, dan kondisi institusional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berfokus pada distribusi sumber daya tidak cukup untuk menciptakan keadilan. Sebaliknya, pembangunan harus memastikan adanya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengembangkan kapabilitasnya, sehingga kebebasan substantif menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan (Saputra et al., 2025).

Dalam praktiknya, pembangunan berbasis kebebasan menuntut partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kebebasan untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa proses pembangunan bersifat inklusif, demokratis,

dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Sen, 1999). Ketika individu memiliki kebebasan yang memadai, mereka dapat berinovasi, beradaptasi, serta berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebebasan tersebut juga memperkuat produktivitas dan solidaritas sosial sebagai fondasi kemajuan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh (Kamiliana & Salsabilla, 2025).

### **Dampak Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo Bagi Masyarakat Lokal**

Pesona Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata di Indonesia sejak lama telah mencuri perhatian dunia. Keberadaan hewan purba komodo, keindahan dunia bawah lautnya, dan sebaran pulau-pulau kecil eksotisnya menjadi daya pikat bagi setiap orang untuk datang dan menikmati kekayaan pariwisata di Labuan Bajo. Berkat kekayaan-kekayaan tersebut, setiap tahunnya angka kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Labuan Bajo terus meningkat. Dilansir dari *Kompas*, sepanjang tahun 2023 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo menyentuh angka 423.847 orang (Taris & Prasetya, 2024). Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi banyak pihak, tetapi tidak bagi kelompok masyarakat kecil di Labuan Bajo.

Pada 2019 sebuah penelitian pernah dilakukan guna memperoleh informasi tentang respon masyarakat Labuan Bajo terhadap pembangunan pariwisata di daerah tersebut (Kiwang & Arif, 2020). Hasilnya ditemukan dampak-dampak negatif yang mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, misalnya kenyamanan masyarakat yang terganggu oleh keramaian kegiatan pariwisata di sana, sehingga lahan-lahan privat mulai hilang. Hal ini wajar mengingat industri hiburan mulai tumbuh menggeliat dengan ditandai peningkatan jumlah hotel, restoran, kafe, dan bar yang menyediakan pesta musik. Selain itu, masyarakat mulai merasakan perubahan gaya hidup seperti cara berpakaian, penggunaan bahasa, dan mulai hilangnya budaya-budaya lokal (Kiwang & Arif, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa lajunya pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal di sana, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Walau dalam sosialisasinya, pemerintah dan pengusaha telah menyatakan janji-janji kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat luas dari efek pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo, nyatanya masih jauh panggang dari api. Ketimbang merasakan manisnya buah pembangunan yang dijanjikan pemerintah dan investor, masyarakat malah dirugikan dengan berbagai kebijakan politik yang dibuat pemerintah demi menjamin kelancaran proyek pembangunan di Labuan Bajo. Berbagai pembangunan fasilitas dan infrastruktur serta kemudahan perizinan investasi bagi para pengusaha berdampak pada peningkatan jumlah usaha dan proyek di

Labuan Bajo, tetapi keuntungan itu semua mesti dibayar dengan pengorbanan dari masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan keadilan-keadilan pembangunan.

Di balik hinga-bingar Labuan Bajo yang tiap hari digenjot aspek pembangunannya, terdapat masalah-masalah manusiawi yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek pariwisata eksklusif di sana. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), yakni Jatam secara tegas mengungkapkan bahwa prospek pembangunan pariwisata Labuan Bajo tidak didesain untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Koordinator Jatam, Melky Nahar mengatakan bahwa warga masyarakat Pulau Komodo misalnya, sejak pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai wilayah konservasi, warga telah direlokasi ke tempat lain, dilarang berburu dan bertani, akibatnya banyak masyarakat yang mesti beralih profesi menjadi nelayan. Tak sampai di situ, sebagian wilayah laut yang masuk wilayah konservasi otomatis diikat oleh aturan-aturan yang sama berlaku di daratan. Bedanya, kali ini masyarakat dipaksa untuk beralih profesi pekerjaan ke sektor hilir pariwisata seperti menjadi karyawan hotel atau pemandu wisata (DA, 2022).

Dalam kasus lain, jurang kesenjangan kepemilikan agraria pun semakin melebar. Para pengusaha dengan mudah merogoh kocek untuk menguasai lokasi-lokasi strategis di Labuan Bajo. Sementara itu, masyarakat lokal sebagai pemegang hak atas tanah mesti berjuang mempertahankan properti mereka di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan politik pembangunan. Akibatnya, di beberapa tempat di Labuan Bajo kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan telah berpindah tangan ke para investor. Hal ini berimbas pada fenomena privatisasi ruang publik yang mulai marak terjadi di Labuan Bajo. Belum lagi muncul oknum-oknum mafia tanah yang setiap saat menjadi ancaman bagi masyarakat lokal yang mempunyai tanah. Oknum-oknum mafia tanah tersebut lahir tak terkendali sejalan dengan naiknya harga tanah dan bangunan di Labuan Bajo. Mereka mengincar tanah-tanah milik masyarakat lokal yang belum memiliki sertifikat kepemilikan (Bagung, 2022).

Selain itu, masalah lain yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata eksklusif Labuan Bajo adalah seputar tenaga kerja. Perlu diakui bahwa sumber daya manusia masyarakat lokal masih tergolong rendah. Ketatnya persaingan dunia kerja membuat banyak masyarakat lokal kalah bersaing, sehingga banyak lapangan-lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata mesti didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini semakin diperparah dengan jargon Pariwisata Eksklusif yang otomatis juga menuntut kemampuan “eksklusif” dari para pekerjanya.

Realitas ini telah melahirkan penderitaan baru bagi masyarakat lokal di Labuan Bajo. Pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo bukannya memecahkan masalah paksis

(baca: kemiskinan dan penderitaan) yang dihadapi masyarakat lokal di sana, malah sebaliknya menambah beban penderitaan baru yang mesti dipikul oleh masyarakat. Atau, bila meminjam kata-kata dari Arturo Escobar katanya; “Pembangunan adalah pencetus masalah bukan hanya ketika ia gagal membangun, tetapi juga ketika ia sukses membangun” (Pinem, 2020). Dengan demikian, kebijakan pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo dapat dinilai kurang tepat dan bijaksana.

### **Analisis Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo Perspektif Amartya Sen**

Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diarahkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Dengan adanya penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber devisa negara dan penggerak ekonomi daerah. Pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, hotel, kawasan wisata, hingga fasilitas pendukung lainnya dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Akan tetapi, apabila dianalisis menggunakan perspektif Amartya Sen, pembangunan tersebut memperlihatkan adanya paradoks pembangunan, yaitu situasi ketika pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kebebasan substantif masyarakat belum sepenuhnya berkembang (Gumelar & Qomar, 2025).

Menurut Amartya Sen sebagaimana yang ditegaskan dalam Saputra et al., (2025) pembangunan tidak boleh hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sebagai proses memperluas kebebasan manusia (*development as freedom*). Dalam pandangan Amartya Sen (1999) pembangunan yang sejati harus mampu meningkatkan kemampuan manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri secara bebas dan bermartabat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan atau meningkatnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, serta kesempatan ekonomi yang adil. Dalam konteks Labuan Bajo, pembangunan pariwisata memang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Jumlah wisatawan yang terus meningkat menyebabkan berkembangnya sektor perhotelan, restoran, jasa transportasi, dan usaha wisata lainnya (Kiwang & Arif, 2020). Pemerintah memandang kondisi ini sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal secara merata.

Adalah bahwa dengan membaca dari perspektif Amartya Sen membantu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan perluasan kebebasan masyarakat. Di Labuan Bajo, sebagian masyarakat lokal justru mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi akibat dominasi investor besar dalam pengelolaan sektor pariwisata. Banyak lahan strategis yang sebelumnya dimiliki masyarakat lokal beralih kepemilikan kepada investor untuk pembangunan hotel, resort, maupun fasilitas wisata eksklusif (Idris & Destari, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan penguasaan sumber daya. Menurut Sen, kondisi semacam ini dapat disebut sebagai bentuk *unfreedoms* atau ketidakbebasan (Gumelar & Qomar, 2025). Ketidakbebasan muncul ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri akibat tekanan ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam kasus Labuan Bajo, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan investor dan kebijakan negara. Keterbatasan modal ekonomi membuat sebagian masyarakat terpaksa menjual tanah mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidup sekaligus kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi utama.

Jika dilihat lebih jauh bahwa dari aspek kebebasan ekonomi, pembangunan pariwisata memang membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal. Banyak masyarakat mulai bekerja di sektor perhotelan, restoran, jasa wisata, maupun perdagangan souvenir (Kiwang & Arif, 2020). Akan tetapi, sebagian besar masyarakat hanya menempati posisi pekerjaan rendah dengan upah terbatas. Posisi strategis dalam industri pariwisata lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ekonomi yang tersedia belum dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat lokal. Dalam perspektif Sen, kebebasan ekonomi tidak hanya berarti tersedianya lapangan pekerjaan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi tersebut secara optimal (Gumelar & Qomar, 2025). Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal menjadi hambatan utama dalam mengakses manfaat pembangunan pariwisata secara lebih luas.

Selain itu, pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo juga menyebabkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Harga tanah, kebutuhan pokok, dan biaya tempat tinggal mengalami kenaikan seiring berkembangnya industri pariwisata (Idris & Destari, 2019). Akibatnya, masyarakat lokal yang tidak terlibat langsung dalam sektor pariwisata justru mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pembangunan belum tentu menciptakan kesejahteraan

yang inklusif. Dari aspek peluang sosial, pembangunan pariwisata sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal. Pemerintah telah menyediakan berbagai program pelatihan pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan industri wisata (Bahri & Abdilah, 2022). Akan tetapi, implementasi program tersebut masih belum optimal dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Dalam pendekatan kapabilitas Amartya Sen, pendidikan dan kesehatan merupakan elemen penting dalam memperluas kebebasan manusia (Gumelar & Qomar, 2025). Pendidikan memungkinkan masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi, sedangkan kesehatan menjadi syarat dasar agar manusia dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara produktif. Oleh karena itu, pembangunan yang terlalu fokus pada pembangunan fisik tanpa diimbangi pembangunan manusia akan menghasilkan ketimpangan sosial. Kondisi tersebut terlihat di Labuan Bajo, ketika pembangunan infrastruktur pariwisata berkembang sangat cepat tetapi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat lokal masih berjalan lambat. Banyak masyarakat belum memiliki kemampuan bahasa asing, keterampilan pelayanan wisata, maupun akses pendidikan tinggi yang memadai (Bahri & Abdilah, 2022). Akibatnya, masyarakat lokal sulit bersaing dalam industri pariwisata modern yang menuntut kualitas sumber daya manusia tinggi.

Selain persoalan ekonomi dan sosial, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo juga menimbulkan persoalan budaya dan lingkungan. Masuknya budaya luar melalui industri pariwisata menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat lokal (Kiwang & Arif, 2020). Nilai-nilai budaya tradisional perlahan mengalami pergeseran akibat dominasi budaya konsumtif dan orientasi ekonomi pasar. Dalam banyak kasus, budaya lokal justru diposisikan hanya sebagai komoditas wisata yang dipertontonkan demi kepentingan industri pariwisata. Menurut Sen sebagaimana yang ditegaskan oleh Adon et al., (2023) kebebasan manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga kemampuan mempertahankan identitas sosial dan budaya. Oleh sebab itu, pembangunan yang menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk pengurangan kebebasan substantif manusia. Dalam konteks Labuan Bajo, pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Perspektif Amartya Sen juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ia menempatkan manusia sebagai subjek aktif pembangunan (*agency*), bukan sekadar objek penerima manfaat pembangunan (Adon et al., 2023). Artinya, masyarakat

harus memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Namun dalam praktiknya, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo masih cenderung bersifat *top-down*. Banyak kebijakan pembangunan ditentukan oleh pemerintah dan investor tanpa melibatkan masyarakat lokal secara bermakna (Gumelar & Qomar, 2025). Aspirasi masyarakat sering kali kalah oleh kepentingan percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kebebasan politik masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka sendiri.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga menyebabkan munculnya konflik sosial terkait penguasaan lahan, relokasi masyarakat, serta privatisasi ruang publik (Idris & Destari, 2019). Beberapa kawasan yang sebelumnya dapat diakses masyarakat secara bebas kini berubah menjadi kawasan privat milik investor. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal. Dalam perspektif Amartya Sen, pembangunan yang baik seharusnya memperluas kapabilitas masyarakat untuk hidup secara bermartabat (Kamiliyana & Salsabilla, 2025). Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan investasi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses pendidikan, pelatihan keterampilan, perlindungan hak atas tanah, serta ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pembangunan (Gumelar & Qomar, 2025). Selain itu, pembangunan pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal agar tidak menimbulkan kerusakan sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, analisis menggunakan perspektif Amartya Sen menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis kebebasan dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan perluasan kapabilitas dan kebebasan substantif masyarakat lokal. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo perlu diarahkan pada model pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata.

#### **4. KESIMPULAN**

Pembangunan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo menunjukkan adanya paradoks pembangunan. Di satu sisi, pembangunan pariwisata berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah wisatawan, investasi, serta pembangunan infrastruktur di daerah. Akan tetapi,

di sisi lain pembangunan tersebut belum sepenuhnya mampu memperluas kebebasan substantif masyarakat lokal sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Amartya Sen dalam perspektif *development as freedom*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal masih menghadapi berbagai bentuk ketidakbebasan (*unfreedoms*), seperti ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, keterbatasan akses terhadap pekerjaan strategis, rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya biaya hidup, marginalisasi masyarakat lokal, hingga melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, pembangunan pariwisata juga memunculkan persoalan sosial budaya berupa perubahan gaya hidup dan terancamnya identitas budaya lokal akibat dominasi logika pasar dan industri pariwisata. Dalam perspektif Amartya Sen, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu memperluas kapabilitas dan kebebasan masyarakat untuk hidup secara bermartabat. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo perlu diarahkan pada pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan.

### **Saran**

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga pada perluasan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dalam perlindungan hak atas tanah, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal, serta penyediaan akses ekonomi yang lebih adil. Selain itu, pemerintah dan pihak investor perlu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata agar tercipta pembangunan yang partisipatif dan demokratis. Pengembangan sektor pariwisata juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai pembangunan berbasis kebebasan dengan menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan kondisi nyata masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya Krisnadi, L. (2023). Kritik Boaventura de Sousa Santos terhadap Ideologi Pembangunan: Sebuah Epistemicide. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 337–346.
- Adon, M. J., Jeraman, G. T., & Andrianto, Y. (2023). Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari amartya sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 1–20.
- Bagung, A. D. D. (2022). *Potret Buram Pembangunan Pariwisata Super Premium Di Labuan Bajo*. The Columnist.
- Bahri, A. S., & Abdilah, F. (2022). Potensi sumber daya manusia bidang pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(2), 84–92.
- DA, A. T. (2022). *Jatam: Desain Pariwisata Labuan Bajo Tidak Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal*. HukumOnline.Com.
- Dale, C. J. P. (2013). *Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik*. Sunspirit.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 260–269.
- Idris, M. H., & Destari, R. (2019). Pengaruh destinasi pariwisata Pulau Komodo terhadap beberapa aspek pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 56–68.
- Kamenparekraf. (2024). *Alasan Menparekraf Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas*. Kamenparekraf.
- Kamiliyana, A. A., & Salsabilla, N. R. (2025). Representasi Ruang Pembebasan dan Pemberdayaan: Telaah Sosiologis pada Agensi Sozo Creative Lab dalam Perspektif Development of Freedom Amartya Sen. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 9(1), 297–311.
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.7290>
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Pinem, M. L. (2020). Kritik Terhadap Epistemologi Barat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 122–129. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984>
- Sakti, N. W. (2019, December). Perkaya Suguhan, Dulang Wisatawan. *Media Keuangan: Tranparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, XIV(147), 5.
- Saputra, R., Habiburrahman, F., Nazli, R., Dewi, K., & Zulpri, Z. (2025). Rekonstruksi Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Capability Approach: Kritik terhadap Rasionalitas Konsumsi dalam Ekonomi Perilaku. *Economia: Journal of Economics and Management*, 4(1), 79–100.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sen, A. (1999). *Freedom. Development*, Oxford University Press, Oxford.
- Taris, N., & Prasetya, A. W. (2024). 423.847 Turis Kunjungi Labuan Bajo Tahun 2023, Turis Asing Terbanyak. Kompas.Com.